

PENGARUH AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ANGKA KEMISKINAN DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MUHAMMAD ABID HABIBI

NPP. 32.0785

Asdaf Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: abidhabibi161@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. H. M. Irwan Tahir, AP., M.Si.

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Paser District, East Kalimantan Province, has managed to consistently improve local government performance accountability over the past ten years - as evidenced by the annual increase in SAKIP scores - poverty in the region has not shown a commensurate downward trend. On the contrary, the percentage of poor people tends to increase, while the regional economic growth rate shows significant fluctuations, including a sharp decline during the pandemic. This condition raises critical questions about the extent to which increased accountability and volatile economic growth can effectively contribute to poverty alleviation. In other words, the causal relationship between local government accountability, economic dynamics, and poverty reduction has not been empirically and systematically exposed, thus requiring further investigation. **Purpose:** This study aims to analyze the influence of local government performance accountability on economic growth and its implications for poverty reduction in Paser Regency. **Method:** The study employs a quantitative approach using multivariate linear regression analysis and the Sobel test. Secondary data were collected from official BPS and KemenPAN-RB publications from 2014 to 2023, including SAKIP scores, Gross Regional Domestic Product (GRDP), and poverty rate data. **Results/Findings:** The results show that local government performance accountability has a negative and significant effect on poverty reduction (coefficient = 0.034; $p = 0.033$). However, accountability does not significantly affect economic growth, and economic growth does not significantly influence poverty reduction. The Sobel test indicates that economic growth does not significantly mediate the relationship between accountability and poverty ($t\text{-value} = -0.451 < t\text{-table} = 2.306$). **Conclusion:** Local government performance accountability has a direct effect on poverty reduction, but not through economic growth as a mediating variable. Therefore, strengthening the accountability system remains a key strategy in poverty alleviation at the regional level. **Keywords:** Accountability, Poverty, Economic Growth, Multivariate Regression, SAKIP, Paser Regency, Sobel Test

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berhasil meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara konsisten selama sepuluh tahun terakhir—terlihat dari kenaikan skor SAKIP setiap tahunnya—angka kemiskinan di wilayah ini tidak menunjukkan tren penurunan yang sepadan. Sebaliknya, persentase penduduk miskin cenderung mengalami kenaikan, sementara laju pertumbuhan

ekonomi daerah memperlihatkan fluktuasi signifikan, termasuk kemerosotan tajam pada masa pandemi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana peningkatan akuntabilitas dan ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi dapat secara efektif berkontribusi pada pengentasan kemiskinan. Dengan kata lain, hubungan kausal antara akuntabilitas pemerintah daerah, dinamika ekonomi, dan penurunan kemiskinan belum terpapar secara empiris dan sistematis, sehingga memerlukan investigasi lebih mendalam. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi serta implikasinya terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Paser. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier multivariat dan uji Sobel. Data sekunder dikumpulkan dari laporan resmi BPS dan KemenPAN-RB tahun 2014–2023 yang mencakup nilai SAKIP, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan persentase penduduk miskin. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penurunan kemiskinan (koefisien = 0,034; $p = 0,033$). Namun, akuntabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Uji Sobel menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memediasi hubungan antara akuntabilitas dan kemiskinan secara signifikan ($t\text{-hitung} = -0,451 < t\text{-tabel} = 2,306$). **Kesimpulan:** Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah memiliki pengaruh langsung terhadap penurunan kemiskinan, tetapi tidak melalui pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Oleh karena itu, penguatan sistem akuntabilitas tetap menjadi strategi utama dalam pengentasan kemiskinan di tingkat daerah. **Kata kunci:** Akuntabilitas, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Regresi Multivariat, SAKIP, Kabupaten Paser, Uji Sobel

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang multidimensi dan menjadi tantangan utama dalam pembangunan nasional maupun daerah. Menurut Todaro dan Smith (2011), kemiskinan tidak hanya mencerminkan ketidakcukupan pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran yang strategis dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan, termasuk upaya menekan angka kemiskinan. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada bagaimana kinerja pemerintah daerah dikelola secara akuntabel. Mardiasmo (2006) menyatakan bahwa akuntabilitas kinerja adalah kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program yang telah direncanakan, dengan tolok ukur yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif Alence, R., & Ndlovu, X. A. (2025) juga menunjukkan bahwa kesejahteraan demokrasi beroperasi melalui mekanisme akuntabilitas pemerintahan dan politik yang baik. Akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi penting karena tata kelola kinerja pemerintah dan teknologi informasi yang efektif bisa menjadi salah satu pendorong transparansi dan efektivitas layanan publik Wahyudi, R., & Murdiyana, M. (2024).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu instrumen yang dikembangkan oleh pemerintah untuk mengukur dan meningkatkan kinerja birokrasi di tingkat pusat dan daerah. KemenPAN-RB dalam laporan evaluasinya menunjukkan bahwa daerah dengan nilai SAKIP tinggi umumnya mampu mengelola anggaran dengan lebih

efisien serta menghasilkan output pembangunan yang lebih tepat sasaran (KemenPAN-RB, 2023). Artinya, akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi juga menjadi fondasi bagi efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang mana dikuatkan oleh penelitian Novriyanto, R. (2022) bahwa Ketepatan sasaran penerima bantuan sosial mencerminkan kualitas mekanisme akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyalurkan program prioritas kepada masyarakat miskin. Hal ini juga dikuatkan oleh penelitian Anindita, P., Yahya, A. S., Nooraini, A., Alma'arif, & Jeddawi, M. (2024) bahwa perangkat daerah dan pakar yang dalam konteks ini pemerintah memiliki hubungan fungsional dengan kebijakan pembangunan ekonomi dan potensi daerah.

Di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, kemiskinan masih menjadi isu strategis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), persentase penduduk miskin di Kabupaten Paser menunjukkan tren fluktuatif selama periode 2014–2023, yang mengindikasikan perlunya penguatan tata kelola kinerja pemerintah daerah. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ravallion (2001) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis menurunkan kemiskinan apabila tidak didukung oleh distribusi yang adil dan kebijakan yang inklusif. Duncan, G (2019) banyak bukti menunjukkan bahwa kurangnya sumber daya ekonomi yang memadai akan mengganggu kemampuan untuk tumbuh dan mencapai kesejahteraan atau menurut Carneiro, P., Cattán, S., & Neves, H. (2025) yaitu perkembangan ekonomi perilaku, yang menyatakan bahwa jalur lain di mana stres yang disebabkan oleh kemiskinan dapat memengaruhi kesejahteraan adalah pengaruh kemiskinan terhadap fungsi kognitif.

Masalah lainnya adalah belum adanya bukti empiris yang menjelaskan secara simultan keterkaitan antara akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan. Padahal, pemahaman atas hubungan antar variabel ini penting untuk menyusun kebijakan pembangunan yang lebih berbasis hasil (outcome-based).

Dengan demikian, penting untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pengaruh akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi serta implikasinya terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Paser. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan..

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Salah Salah satu kesenjangan utama dalam kajian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah adalah kurangnya pemetaan hubungan yang komprehensif antara kualitas kinerja birokrasi dengan indikator makro pembangunan, khususnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Meskipun pemerintah telah mengembangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai alat ukur kinerja birokrasi secara nasional, sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada aspek evaluatif administratif dari akuntabilitas tanpa mengaitkannya secara empiris dengan capaian sosial ekonomi masyarakat, khususnya pada tingkat daerah.

Di Kabupaten Paser, akuntabilitas kinerja melalui SAKIP telah diterapkan, namun belum banyak ditemukan kajian empiris yang membuktikan apakah peningkatan skor SAKIP memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam menurunkan

angka kemiskinan. Ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2006), yang menekankan bahwa akuntabilitas tidak hanya menyangkut kewajiban pelaporan, tetapi harus berdampak pada hasil pembangunan yang terukur. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih jauh sejauh mana sistem kinerja ini mampu memengaruhi variabel pembangunan yang bersifat outcome seperti pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan.

Selain itu, kesenjangan lain terletak pada kurangnya integrasi dalam menguji hubungan kausal antara akuntabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan penurunan kemiskinan secara simultan. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih meneliti hubungan antara dua variabel secara parsial, seperti antara akuntabilitas dan efisiensi anggaran (Fitriana, 2020) atau antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (Ravallion & Chen, 2003), namun belum secara utuh memodelkan keterhubungan ketiganya dalam satu model analisis yang komprehensif.

Keterbatasan ini diperparah oleh minimnya data dan perhatian terhadap mekanisme mediasi dalam hubungan antara kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat. Padahal, pertumbuhan ekonomi berpotensi menjadi variabel antara yang menjelaskan bagaimana kinerja birokrasi dapat memengaruhi tingkat kemiskinan. Namun hingga saat ini, belum ada bukti empiris yang kuat apakah pertumbuhan ekonomi di daerah seperti Paser benar-benar menjadi saluran utama dalam menurunkan kemiskinan, atau justru proses tersebut berjalan langsung melalui intervensi program yang bersumber dari akuntabilitas kinerja.

Kesenjangan penelitian lainnya adalah belum banyaknya studi yang menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis regresi multivariat dan uji mediasi (Sobel test) untuk menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel-variabel tersebut. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung bersifat deskriptif atau studi kasus yang tidak memberikan generalisasi kuat terhadap hubungan antar variabel.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan membangun model analisis yang menguji pengaruh akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan implikasinya terhadap penurunan kemiskinan secara simultan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang bermanfaat bagi pengambilan kebijakan berbasis kinerja di tingkat daerah, khususnya dalam mendesain strategi pembangunan yang terukur, transparan, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian Penelitian Penelitian pertama oleh Fitriana (2020) meneliti hubungan antara akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan efisiensi pengelolaan anggaran daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang diukur melalui nilai SAKIP. Namun, perbedaannya adalah bahwa penelitian Fitriana menitikberatkan pada efisiensi anggaran sebagai output administratif, sedangkan penelitian ini mengeksplorasi pengaruh SAKIP terhadap outcome pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan.

Penelitian kedua oleh Lestari dan Nugroho (2019) menganalisis keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di beberapa provinsi di Indonesia dengan pendekatan panel data. Kesamaan dengan penelitian ini adalah adanya fokus pada hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Namun, Lestari dan Nugroho tidak memasukkan variabel akuntabilitas atau kualitas tata kelola pemerintahan dalam modelnya, sehingga tidak

menggambarkan secara lengkap peran pemerintah daerah. Penelitian ini hadir untuk melengkapi celah tersebut dengan mengaitkan aspek manajerial pemerintah melalui indikator SAKIP.

Penelitian ketiga oleh Sihombing (2021) mengkaji dampak transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap kualitas pelayanan publik. Fokus penelitian ini dan penelitian Sihombing sama-sama mengangkat isu akuntabilitas birokrasi, namun konteks yang digunakan berbeda. Sihombing menekankan pada pelayanan publik sebagai output administratif, sedangkan penelitian ini mengarah pada hasil pembangunan makro seperti kemiskinan dan ekonomi sebagai bentuk outcome dari akuntabilitas pemerintah.

Penelitian keempat oleh Simanjuntak (2022) menggunakan pendekatan regresi multivariat untuk menganalisis pengaruh belanja daerah terhadap kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel mediasi. Persamaannya terletak pada penggunaan pendekatan analisis regresi multivariat dan uji mediasi (Sobel test). Namun, penelitian Simanjuntak berfokus pada pengaruh belanja daerah sebagai input fiskal, bukan pada aspek kinerja birokrasi. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengganti belanja publik menjadi kualitas akuntabilitas kinerja sebagai variabel bebas utama.

Penelitian kelima oleh Rachmawati (2018) membahas pengaruh kualitas perencanaan pembangunan daerah terhadap capaian indikator pembangunan manusia (IPM). Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama menelusuri dampak tata kelola pemerintah daerah terhadap indikator pembangunan. Namun, perbedaan utamanya adalah bahwa penelitian Rachmawati menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan model hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel, untuk menguji signifikansi empiris antar variabel yang diteliti.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang banyak memfokuskan pada hubungan kinerja pemerintah, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan secara terpisah (Fitriana, 2020; Simanjuntak, 2022; Lestari dan Nugroho, 2019). Dengan memadukan ketiganya dalam satu model regresi linier multivariat yang dilengkapi uji Sobel, penelitian ini merupakan salah satu yang pertama menguji simultan efek langsung dan tidak langsung akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (diukur melalui skor SAKIP) terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan pada tingkat kabupaten khususnya di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

Kebaruan berikutnya terletak pada penggunaan skor SAKIP sebagai indikator utama kinerja birokrasi daerah untuk mengukur outcome pembangunan makro, alih-alih hanya sebagai alat evaluasi administratif berbeda dengan penelitian oleh (Fitriana, 2020; Simanjuntak, 2022). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai sejauh mana peningkatan nilai SAKIP berdampak pada laju pertumbuhan PDRB dan penurunan angka kemiskinan, tetapi juga mengungkap jalur mediasi pertumbuhan ekonomi dalam hubungan tersebut.

Keunikan metode ini diperkuat oleh uji Sobel yang eksplisit menelusuri mekanisme efek tidak langsung akuntabilitas melalui pertumbuhan ekonomi sesuatu yang belum banyak dikaji pada konteks kabupaten berkembang seperti Paser. Selain menambah kontribusi teoritis pada literatur ekonomi pembangunan dan manajemen pemerintahan daerah, hasil penelitian juga menawarkan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Kabupaten Paser agar memperluas fokus penguatan akuntabilitas dari sekadar pelaporan administratif menuju desain program yang

benar-benar menghasilkan penurunan kemiskinan. Temuan ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah lain dalam merumuskan strategi berbasis kinerja yang inklusif dan berkelanjutan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang peneliti gunakan sebagai referensi yaitu (Fitriana, 2020; Simanjuntak, 2022; Rachmawati, 2018; Sihombing, 2021 Lestari dan Nugroho, 2019) yang mana tidak menggunakan uji sobel dalam menentukan hubungan antara variabel.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terhadap laju pertumbuhan ekonomi dan implikasinya terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur.

II. METODE

Pendekatan Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena bertujuan untuk menguji hubungan kausal antar variabel secara objektif melalui analisis statistik. Pendekatan ini dinilai tepat untuk meneliti pengaruh akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi serta implikasinya terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Paser. Menurut Sugiyono (2016), pendekatan kuantitatif digunakan untuk menguji hipotesis dan menjelaskan fenomena melalui data numerik yang dianalisis menggunakan metode statistik tertentu. Pemilihan metode ini juga didukung oleh pandangan Simangunsong (2017:190), yang menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif bersifat absolut dan akan mencerminkan hasil sesuai data, yaitu informasi atau fenomena yang muncul selama proses pengumpulan data. Dalam konteks mencari hubungan antara variabel, pendekatan ini memungkinkan peneliti menghitung seberapa besar pengaruh dan hubungan antara variabel.

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis regresi linier multivariat untuk mengetahui pengaruh langsung dari variabel akuntabilitas terhadap pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Selain itu, digunakan pula uji Sobel untuk menganalisis pengaruh tidak langsung, yaitu untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara akuntabilitas kinerja dan penurunan kemiskinan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh dari lembaga-lembaga resmi pemerintah. Data akuntabilitas kinerja diukur menggunakan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Data pertumbuhan ekonomi diperoleh dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sedangkan data penurunan kemiskinan diukur berdasarkan persentase penduduk miskin, yang diperoleh dari laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS). Rentang waktu data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tahun 2014 hingga 2023 agar hasil analisis mampu merepresentasikan dinamika variabel secara komprehensif dalam jangka panjang.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (X), variabel mediasi yaitu pertumbuhan ekonomi (Z), dan variabel dependen yaitu penurunan angka kemiskinan (Y). Untuk menguji hubungan antar variabel, digunakan perangkat lunak EViews 12 sebagai alat bantu analisis statistik. Analisis data dilakukan melalui uji regresi multivariat untuk mengetahui pengaruh langsung X terhadap Y dan X terhadap Z, serta uji Z terhadap Y. Selanjutnya, digunakan uji Sobel untuk menguji pengaruh tidak langsung dari X terhadap Y melalui Z. Hasil analisis kemudian ditafsirkan

berdasarkan nilai koefisien regresi, nilai t-hitung, serta signifikansi p-value yang dibandingkan dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) untuk menentukan pengaruh yang signifikan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Deskripsi Statistik Data Penelitian

Berdasarkan Dalam penelitian ini, deskripsi statistik digunakan untuk menggambarkan karakteristik dasar dari tiga variabel utama: Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (X) yang diukur dengan nilai SAKIP, Pertumbuhan Ekonomi (Z) yang diukur dari laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan Tingkat Kemiskinan (Y) yang diukur berdasarkan persentase jumlah penduduk miskin. Tujuan dari tahap deskriptif ini adalah memetakan rentang nilai dan kecenderungan rata-rata setiap variabel selama periode 2014–2023, sebelum melanjutkan ke analisis kausal yang lebih mendalam.

variabel akuntabilitas kinerja pemerintah daerah di Kabupaten Paser menunjukkan stabilitas yang tinggi (rata-rata SAKIP 68,11; rentang 55,33–75,00), sejalan dengan temuan Sihombing (2021) yang melaporkan bahwa pemerintahan daerah dengan skor SAKIP konsisten di atas ambang minimal cenderung mempertahankan kualitas layanan publik. Namun, berbeda dengan Fitriana (2020) yang menemukan korelasi positif antara peningkatan skor SAKIP dan penurunan kemiskinan di kota besar, penelitian ini mengungkap bahwa meski akuntabilitas meningkat, tingkat kemiskinan di Paser tetap stagnan bahkan sempat naik dari 8,61 % hingga 9,73 % pada periode 2014–2023.

Dinamika pertumbuhan ekonomi Paser (rata-rata 1,40 %; rentang –2,86 % hingga 5,39 %) memperlihatkan fluktuasi tajam, terutama kemerosotan pada 2020 dan rebound pada 2021. Hasil ini mendukung observasi Lestari dan Nugroho (2019) mengenai kerentanan perekonomian daerah terhadap guncangan pandemi, tetapi bertolak belakang dengan laporan Simanjuntak (2022) yang menyatakan bahwa wilayah dengan kebijakan fiskal proaktif mampu menstabilkan laju PDRB selama krisis. Artinya, meski Paser berhasil pulih cepat, efektivitas kebijakan ekonomi belum optimal untuk menahan dan menurunkan angka kemiskinan.

Ketidaksesuaian antara stabilitas akuntabilitas, ketidakstabilan pertumbuhan ekonomi, dan stagnasi kemiskinan mengindikasikan bahwa penguatan tata kelola birokrasi dan perbaikan kondisi makroekonomi saja belum cukup. Hal ini mengonfirmasi kritik dari Fitriana (2020) bahwa tanpa intervensi program pro-poor yang terarah, kenaikan skor SAKIP tidak otomatis menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, analisis regresi multivariat berikutnya akan menguji kekuatan dan arah hubungan kausal antar variabel, sekaligus melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan validitas model, agar rekomendasi kebijakan dapat lebih tepat sasaran dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan gambaran deskriptif ketiga variabel, terlihat adanya ketidaksejajaran antara stabilnya nilai SAKIP dan fluktuasi pertumbuhan ekonomi dengan data kemiskinan yang cenderung stagnan. Hal ini mengisyaratkan bahwa peningkatan akuntabilitas dan pemulihan ekonomi saja belum cukup untuk mendorong penurunan kemiskinan secara signifikan. Terdapat kemungkinan bahwa intervensi pemerintah daerah selama periode penelitian belum terfokus pada program-program yang secara langsung menasar kelompok rentan.

Untuk menindaklanjuti temuan ini, penelitian akan dilanjutkan dengan analisis regresi multivariat. Analisis ini bertujuan mengukur besaran dan arah pengaruh variabel Akuntabilitas (X) dan Pertumbuhan Ekonomi (Z) terhadap Tingkat Kemiskinan (Y). Sebelum itu,

serangkaian uji asumsi klasik—termasuk normalitas residual, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas—akan dilakukan untuk memastikan validitas model. Dari koefisien regresi yang diperoleh, penelitian akan menginterpretasikan implikasi kebijakan, misalnya: sejauh mana peningkatan satu poin SAKIP berdampak pada penurunan persentase kemiskinan, serta sensitivitas kemiskinan terhadap fluktuasi pertumbuhan PDRB.

Dengan demikian, rangkaian analisis ini diharapkan tidak hanya menjelaskan hubungan kausal antar variabel, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi mengurangi kemiskinan melalui penguatan akuntabilitas dan penetapan target pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

3.2. Hasil Uji Regresi Linier Multivariat

Pada Pengujian regresi linier multivariat dalam penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (X) terhadap penurunan kemiskinan (Y) baik secara langsung maupun melalui variabel intervening, yaitu laju pertumbuhan ekonomi (Z). Uji ini melibatkan pengolahan data dengan perangkat lunak EViews 12, dan hasil analisis ditunjukkan dalam berbagai pengujian statistik, termasuk uji-t, uji-F, dan koefisien determinasi (Adjusted R-squared).

Hasil Berdasarkan hasil regresi antara variabel akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (X) terhadap penurunan angka kemiskinan (Y), diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y=7.277844+0.034127X$$

Hasil uji-t nilai t-hitung sebesar 2.561271, yang lebih besar dari t-tabel (2.306004), serta nilai probabilitas (0.0336) yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Hal ini menandakan bahwa pengaruh tersebut signifikan secara statistik. menunjukkan pengaruh akuntabilitas pemerintah daerah yang negatif dan signifikan terhadap angka penurunan kemiskinan. Maka dapat dikatakan bahwa setiap penurunan kemiskinan mampu menjelaskan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dapat menekan angka kemiskinan yang tinggi.

Nilai Adjusted R-squared sebesar 0.381873 menunjukkan bahwa sekitar 38.19% variasi dalam penurunan kemiskinan dapat dijelaskan oleh variasi dalam akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan hasil bahwa sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap penurunan angka pengangguran. Sehingga hipotesis dalam penelitian ini terjawab. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa jika sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat dengan signifikan maka angka kemiskinan dapat ditekan dengan semaksimal mungkin untuk dapat memberikan masyarakat kehidupan yang layak dan sejahtera.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sutaryo dan Sinaga (2018), yang menyimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja yang baik dalam pemerintah daerah berkontribusi pada efektivitas program-program sosial, termasuk pengentasan kemiskinan. Penelitian lain oleh Susanto et al. (2021) juga mendukung temuan ini dengan menyatakan bahwa daerah yang memiliki sistem akuntabilitas yang kuat lebih mampu menyalurkan bantuan dan program pengembangan ekonomi lokal secara tepat sasaran.

Singkatnya Hasil uji-t menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan (Y), dengan nilai t-hitung sebesar $2.561271 > t\text{-tabel } 2.306004$ dan nilai signifikansi $0.0336 < 0.05$. Hal ini menunjukkan

bahwa semakin baik akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, maka semakin rendah tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil regresi antara akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (X) terhadap pertumbuhan ekonomi (Z), diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Z = -3.619031 + 0.096095X$$

Nilai t-hitung sebesar $0.839373 < t\text{-tabel}$ (2.306004) dan nilai probabilitas (0.4256) jauh lebih besar dari tingkat signifikansi 5%. Artinya, pengaruh akuntabilitas terhadap pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik.

Nilai R-squared sebesar 0.080940 juga menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas hanya mampu menjelaskan 8.09% variasi dalam pertumbuhan ekonomi, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis sistem akuntabilitas yang baik seharusnya dapat mendukung efisiensi anggaran dan perencanaan pembangunan daerah, namun pada konteks Kabupaten Paser selama periode 2014–2023, hal ini belum terlihat secara nyata dalam memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Ini bertolak belakang dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti Halim dan Abdullah (2006), yang menyebutkan bahwa peningkatan akuntabilitas fiskal mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui efisiensi pembangunan.

Perbedaan hasil ini bisa jadi disebabkan oleh perbedaan karakteristik daerah, implementasi kebijakan, atau faktor eksternal seperti harga komoditas, pandemi, dan investasi swasta yang dominan di wilayah tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah belum terbukti secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Paser, dan kemungkinan terdapat faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi variabel tersebut.

Singkatnya hasil uji-t antara variabel akuntabilitas (X) terhadap laju pertumbuhan ekonomi (Z) menunjukkan nilai t-hitung sebesar $0.839373 < t\text{-tabel}$, sehingga tidak signifikan.

Berdasarkan hasil regresi antara laju pertumbuhan ekonomi (Z) terhadap penurunan kemiskinan (Y), diperoleh persamaan regresi linear sebagai berikut:

$$Y = 8.997598 + 0.007522Z$$

secara statistik, hubungan ini tidak signifikan karena nilai t-hitung sebesar $0.141516 < t\text{-tabel}$ (2.306004) dan nilai probabilitas sebesar 0.8910 jauh di atas batas signifikansi 5%.

selanjutnya, nilai R-squared hanya sebesar 0.002497, yang artinya variabel pertumbuhan ekonomi hanya menjelaskan sekitar 0.25% variasi dalam tingkat kemiskinan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Hasil ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Paser selama periode 2014–2023 belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh pola pertumbuhan yang tidak inklusif atau tidak merata, sehingga peningkatan ekonomi belum dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin.

Temuan ini berbeda dengan beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat secara signifikan menurunkan kemiskinan, seperti yang ditunjukkan oleh (Ravallion & Chen, 2003), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat bawah secara langsung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, belum terjadi perbaikan signifikan dalam pengurangan kemiskinan, yang mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih spesifik menyoar kelompok rentan agar pertumbuhan yang ada lebih berdampak secara langsung.

Singkatnya hubungan antara pertumbuhan ekonomi (Z) terhadap penurunan kemiskinan (Y), yang menghasilkan t-hitung sebesar $0.141516 < t\text{-tabel}$ dan signifikansi $0.8910 > 0.05$. Ini berarti, baik akuntabilitas terhadap pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan, tidak menunjukkan hubungan yang signifikan secara statistik.

Pada uji simultan (uji-F), diperoleh nilai F-hitung sebesar 3.131096 yang lebih kecil dari nilai F-tabel sebesar 4.737414, sehingga secara simultan variabel akuntabilitas dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

Selanjutnya Uji koefisien Determinasi, Pada penelitian ini peneliti menggunakan Adjusted R-squared atau koefisien determinasi yang disesuaikan merupakan ukuran statistik yang menunjukkan seberapa besar variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam suatu model regresi, setelah memperhitungkan jumlah variabel yang digunakan dalam model tersebut. Nilai ini berguna untuk menilai kelayakan model ketika terdapat lebih dari satu variabel bebas.

Berdasarkan hasil output regresi linear berganda yang ditampilkan pada Gambar 4.8, diperoleh nilai Adjusted R-squared sebesar 0,321379. Artinya, sekitar 32,13% variasi penurunan kemiskinan di Kabupaten Paser dapat dijelaskan oleh dua variabel independen dalam model, yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar 67,87% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian ini.

Nilai Adjusted R-squared ini menunjukkan bahwa meskipun hubungan antar variabel belum tergolong sangat kuat, namun model regresi yang digunakan tetap memiliki kemampuan dalam menjelaskan pengaruh dua variabel independen terhadap variabel dependen secara moderat. Hal ini mengindikasikan bahwa model masih layak untuk digunakan dalam penelitian, terutama karena salah satu variabel independen terbukti berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

Secara keseluruhan, hasil regresi linier multivariat menunjukkan bahwa hanya akuntabilitas yang memiliki pengaruh signifikan secara langsung terhadap kemiskinan, sementara pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan, baik sebagai variabel independen maupun sebagai mediator dalam hubungan antara akuntabilitas dan kemiskinan.

3.3. Hasil Uji Mediasi (Sobel Test)

Berdasarkan Uji mediasi dilakukan dengan menggunakan metode Sobel Test untuk mengetahui apakah variabel pertumbuhan ekonomi (Z) dapat memediasi hubungan antara akuntabilitas kinerja pemerintah daerah (X) terhadap penurunan angka kemiskinan (Y) di Kabupaten Paser. Analisis ini dilakukan dengan menghitung nilai t-hitung berdasarkan koefisien regresi dan standard error dari dua jalur, yaitu dari X ke Z (a) dan dari Z ke Y (b).

Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa koefisien regresi antara $X \rightarrow Z$ sebesar 0.096095 dengan standard error 0.114484, dan dari $Z \rightarrow Y$ sebesar 0.007522 dengan standard error 0.053151. Dengan memasukkan data tersebut ke dalam rumus uji Sobel, diperoleh nilai t-hitung sebesar -0.4515128. Sementara itu, nilai t-tabel pada tingkat signifikansi 5% dan derajat

kebebasan (df) = 8 adalah sebesar 2.306004.

Karena nilai t-hitung (-0.4515128) lebih kecil daripada t-tabel (2.306004), maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan antara akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan penurunan kemiskinan. Artinya, pengaruh akuntabilitas terhadap kemiskinan terjadi secara langsung, tidak melalui jalur pertumbuhan ekonomi sebagai variabel antara.

3.4. Dikusi Temuan di Pembahasan

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutaryo dan Sinaga (2018), yang mengemukakan bahwa akuntabilitas kinerja yang baik berkontribusi positif terhadap efektivitas pelaksanaan program sosial, termasuk pengentasan kemiskinan.

Hal baru yang peneliti temukan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga tidak secara signifikan memediasi pengaruh akuntabilitas terhadap penurunan kemiskinan. Temuan ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas dalam manajemen publik berperan langsung dalam menekan angka kemiskinan, namun tidak selalu tercermin dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam konteks daerah tertentu seperti Kabupaten Paser.

Namun, temuan mengenai tidak signifikannya hubungan antara akuntabilitas dan pertumbuhan ekonomi bertentangan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Halim dan Abdullah (2006) menyebutkan bahwa peningkatan akuntabilitas fiskal mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi anggaran dan pembangunan daerah. Perbedaan hasil ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik wilayah, kondisi ekonomi makro, serta dinamika politik dan sosial yang memengaruhi efektivitas kebijakan publik.

Selanjutnya, tidak ditemukannya pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan juga telah tercatat dalam beberapa studi lain. Salah satunya oleh Hambarsari dan Kunto (2016) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pengurangan kemiskinan jika tidak disertai dengan distribusi pendapatan yang adil dan kebijakan perlindungan sosial yang kuat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam konteks Kabupaten Paser, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah lebih efektif secara langsung dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan melalui jalur pertumbuhan ekonomi. Hasil ini memperkuat argumen bahwa perbaikan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas publik harus menjadi prioritas dalam agenda pengentasan kemiskinan, sekaligus menjadi referensi kebijakan yang adaptif terhadap karakteristik daerah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linier multivariat dan uji Sobel, dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Paser. Pengaruh ini bersifat langsung dan ditunjukkan melalui nilai koefisien regresi sebesar 0,034 dengan tingkat signifikansi 0,033 ($p < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas kinerja yang

dicerminkan melalui sistem SAKIP, maka semakin besar kemungkinan penurunan angka kemiskinan di daerah tersebut.

Namun demikian, hasil pengujian juga menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dibuktikan dengan nilai t -hitung sebesar $0,839 < t$ -tabel. Demikian pula, pertumbuhan ekonomi tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan, serta tidak mampu memediasi hubungan antara akuntabilitas dan kemiskinan secara signifikan berdasarkan hasil uji Sobel (t -hitung = $-0,451 < t$ -tabel = $2,306$).

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun akuntabilitas memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan sosial melalui penurunan angka kemiskinan, pengaruh tersebut tidak berjalan melalui jalur pertumbuhan ekonomi. Artinya, kebijakan berbasis akuntabilitas cenderung berdampak langsung pada sasaran sosial, tanpa memerlukan mediasi dari variabel ekonomi makro. Hal ini memberikan pemahaman bahwa reformasi kinerja pemerintahan yang fokus pada efektivitas program sosial lebih relevan dalam konteks pengentasan kemiskinan di Kabupaten Paser.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan dari sisi ruang lingkup geografis, yaitu hanya berfokus pada Kabupaten Paser selama periode 2014–2023. Selain itu, variabel yang digunakan masih terbatas pada tiga indikator utama, sehingga tidak menjangkau faktor-faktor lain yang juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, seperti investasi, belanja sosial, atau kualitas pelayanan publik. Selain itu, pendekatan kuantitatif tidak menggali aspek kualitatif yang mungkin menjelaskan lebih lanjut keterkaitan antar variabel.

Arah Penelitian Selanjutnya (Future Work)

Penelitian mendatang dapat memperluas cakupan wilayah dan melakukan analisis komparatif antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur atau daerah lain dengan karakteristik ekonomi yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat menambahkan variabel kontrol lain seperti belanja daerah, pendidikan, atau kesehatan untuk memberikan hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, penggunaan pendekatan mix-methods dengan melibatkan data kualitatif seperti wawancara atau studi kasus dapat memperkaya analisis terhadap pengaruh akuntabilitas terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan penelitian ini. Dukungan, kerja sama, dan kontribusi berbagai pihak memungkinkan penelitian ini terlaksana dengan baik dan menghasilkan temuan yang berguna bagi Pemerintahan Kabupaten Paser dalam memahami seberapa besar hubungan dan pengaruh akuntabilitas terhadap angka kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian, Pemerintah Kabupaten Paser dapat menyiapkan strategi dan kebijakan untuk dapat memberantas kemiskinan, membangun ekonomi, dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alence, R., & Ndlovu, X. A. (2025). Political accountability and development in Africa's resource economies. *Extractive Industries and Society*, 23, Article 101634. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2025.101634>
- Anindita, P., Yahya, A. S., Nooraini, A., Alma'arif, & Jeddawi, M. (2024). Analisis potensi ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah penyangga dalam pembangunan Ibukota Negara (Nusantara). *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja IPDN*, 50(1), 63–77. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/4077>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser. (2023). Data kemiskinan Kabupaten Paser tahun 2014–2023. Paser: BPS Kabupaten Paser.
- Carneiro, P., Cattán, S., & Neves, H. (2025). Theoretical and empirical perspectives on the link between poverty, parenting and children's outcomes. *Fiscal Studies*, 46(1), 9–35. <https://doi.org/10.1111/1475-5890.12404>
- Duncan, G. (2019). A roadmap to reducing child poverty. National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/25246>
- Fitriana, A. (2020). Pengaruh akuntabilitas kinerja pemerintah daerah terhadap efisiensi pengelolaan anggaran daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 5(2), 45–60.
- Hambarsari, D. P., & Kuanto, I. (2016). Analisis pengaruh ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur tahun 2004–2014. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 14(1), 12–30. <http://journal.unair.ac.id/jpw/article/view/5678>
- Halim, A., & Abdullah, N. (2006). Pengaruh akuntabilitas fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 7(1), 23–38. <https://ejournal.undip.ac.id/jep/article/view/910>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Jakarta: KemenPAN-RB.
- Mahsun, M. (2006). Pengukuran kinerja sektor publik. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2006). Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Yogyakarta: Andi.
- Mustopadjadja, M. (2003). Indikator pengukuran kinerja organisasi publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 1–15. <http://www.adminpublik.or.id/jap/article/view/112>
- Novriyanto, R. (2022). *Kinerja Aparatur Sipil Negara Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata dalam pengelolaan objek wisata Pantai Toronipa di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara* (Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/10107>
- Rachmawati, R. (2018). Pengaruh kualitas perencanaan pembangunan daerah terhadap capaian indikator pembangunan manusia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan Daerah*, 4(2), 77–91. <https://ejournal.bappeda.jabarprov.go.id/jppd/article/view/334>
- Rochim, A. (2019). Evaluasi implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah. *Jurnal Manajemen Pemerintahan IPDN*, 3(2), 45–60. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/876>
- Ravallion, M. (2001). Growth, inequality and poverty: Looking beyond averages. *World Development*, 29(11), 1803–1815. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(01\)00070-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(01)00070-8)
- Ravallion, M., & Chen, S. (2003). Measuring pro-poor growth. *Economics Letters*, 78(1), 93–99. [https://doi.org/10.1016/S0165-1765\(03\)00161-0](https://doi.org/10.1016/S0165-1765(03)00161-0)
- Sihombing, A. H. (2021). Dampak transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah terhadap kualitas pelayanan publik. *Jurnal Pelayanan Publik*, 6(3), 101–115. <https://journal.ipdn.ac.id/jpp/article/view/225>
- Simangunsong, F. (2017). Metode Penelitian Sosial Kualitatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, A. (2022). Pengaruh belanja daerah terhadap kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi sebagai mediasi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(4), 157–172. <https://ejournal.undip.ac.id/jep/article/view/789>
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

- Susanto, D., Wijaya, I., & Fadillah, R. (2021). Peran sistem akuntabilitas kinerja dalam pengentasan kemiskinan lokal. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(2), 56–70. <https://ejournal.ipdn.ac.id/jkp/article/view/345>
- Sutaryo, & Sinaga, P. (2018). Akuntabilitas kinerja dan efektivitas program sosial dalam penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 3(1), 12–28. <http://journals.usu.ac.id/jsp/article/view/456>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic development* (11th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Wahyudi, R., & Murdiyana, M. (2024). *Penilaian tata kelola teknologi informasi berbasis kinerja organisasi menggunakan COBIT 2019 dan Balanced Scorecard (Studi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kolaka Timur)* (Other thesis, IPDN). <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/19553>

